

I Ketut Ardhana
Anak Agung Gede Raka
Dewa Ketut Budiana
I Nyoman Suarka



Pancasila, Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali

PANCASILA, KEARIFAN LOKAL, DAN MASYARAKAT BALI

I Ketut Ardhana
Anak Agung Gede Raka
Dewa Ketut Budiana
I Nyoman Suarka

Pustaka Larasan
2019

**PANCASILA, KEARIFAN LOKAL,
DAN MASYARAKAT BALI**

Editor

I Ketut Ardhana

Penulis

I Ketut Ardhana
Anak Agung Gede Raka
Dewa Ketut Budiana
I Nyoman Suarka

Tata Letak

Slamat Trisila

Rancang Sampul

Ibed Sugana Yuga

Penerbit

Pustaka Larasan

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B
Denpasar, Bali

Posel: pustaka.larasan@gmail.com
Ponsel: 0817353433

Bekerja sama dengan

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI)

Cetakan Pertama

Juni 2019

ISBN 978-602-5401-49-7



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan PHDI	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Permasalahan	3
Tujuan dan Manfaat	4
Ruang Lingkup	4
Metode	5
Output dan Outcome	5
Referensi Sejauh Ini	6
Bab 2. Keadaan Alam dan Kekhususan Masyarakat dan Budaya Bali	11
Keadaan Alam	11
Kekhususan Masyarakat dan Budaya Bali	13
Bab 3. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Zaman Prahindu dan Hindu di Bali	19
Kearifan Lokal Prasejarah	19
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kearifan Lokal Prasejarah..	22
Kearifan Lokal Pada Zaman Hindu	28
Nilai-Nilai Pancasila dalam Warisan Arkeologi	31
Bab 4. Nilai-Nilai Pancasila dalam Ritual Keagamaan Hindu dan Seni Arsitektur Tradisional Bali	53
Pancasila dalam Upacara Agama Hindu	53
Pancasila dalam Seni dan Arsitektur Tradisionil Bali	73

**Bab 5. Nilai-Nilai Pancasila dalam Sastra Lisan dan
Pernaskahan Bali Tradisional 81**

Nilai Luhur Budaya Bangsa pada Kisah Burung Garuda
dalam Lontar Adiparwa 82

Nilai Multikultur dalam Motto Bhinneka Tunggal Ika
Nusantara bahkan Asia Tenggara 93

Pancasila 95

Indeks 125

Tentang Penulis 129

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehdapan Tuhan Yang Mahaesa/ Ida Sanghyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya lah kajian ini dapat diselesaikan dan hadir dihadapan pembaca. Kajian ini mengangkat permasalahan Pancasila, kearifan lokal, masyarakat Bali dalam kaitannya dengan bagaimana kearifan lokal yang sudah ada lama di Bali sebelum hingga setelah masuknya agama Hindu serta perkembangan masyarakat dan budaya Bali pada masa modern dan postmodern ini dapat memberikan kontribusinya pada pemahaman tentang sila-sila pada Pancasila. Ide tentang pelaksanaan kajian ini bermula dari lontaran pemikiran yang diberikan oleh Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya sebagai Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Pusat di Jakarta kepada kami agar dapat melaksanakan kajian ini secara komprehensif. Untuk itu, atas inisiasi yang sudah dilakukan oleh beliau, tim pengkaji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kajian ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan peneliti dari Universitas Hindu Indonesia Denpasar (UNHI) Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Udayana (FIB-UNUD), dan Universitas Warmadewa (UNWAR). Berbagai sumber yang berkaitan dengan tinggalan-tinggalan arkeologi dan kesejarahan telah dikumpulkan dan dianalisis berkaitan dengan cerita rakyat, mitos, kepercayaan dan pemahaman spiritualitas dan religiusitas yang diperoleh di lapangan yang terdapat pada kehidupan masyarakat dan budaya Bali dari masa lalu hingga dewasa ini. Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis atas kerja kerasnya, sehingga kajian ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Untuk menambah wawasan dan perseptif tentang kearifan lokal, agama dan kepercayaan yang ada di Bali pada

hususnya, juga dilaksanakan diskusi kelompok terarah dengan mengundang narasumber Prof. I Made Titib, Ph.D., (Ida Pandita Mpu Acharya Jaya Daksa Vedananda) dan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. Atas sumbangan pemikirannya yang sangat berharga tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman secara lebih komprehensif tentang aspek-aspek yang dibahas dalam kajian ini. Oleh karena itu, tim penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, sehingga kajian yang dilakukan ini dapat menambah wawasan dan perspektif baru tentang sumbangan kearifan lokal, masyarakat Bali dalam memahami bagaimana kontribusinya terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah bersedia membantu untuk menerbitkan kajian ini, sehingga kajian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pelaksanaan kajian-kajian yang lebih mendalam di masa yang akan datang. Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan pemikirannya baik spiritual dan material yang sangat berguna demi terwujudnya kajian ini.

Om Shanti, Shanthi, Shanti, Om.

Denpasar, 21 Juni 2019

Yayasan Pendidikan Widya Kerthi

Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Ketua,

Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M. A.

SAMBUTAN
KETUA UMUM PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
(PHDI) PUSAT

Om Swastyastu,

Pertama-tama patut kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Mahaesa, karena berkat Anugerah Beliau Kajian Pancasila, Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali telah selesai disusun.

Buku yang diberi judul *Pancasila, Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali* di dalamnya menguraikan tentang kontribusi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan budaya Bali yang berkaitan dengan sudut pandang falsafah kenegaraan yang terdapat didalam Pancasila. Kajian ini diharapkan nantinya akan menambah wawasan dan perspektif tentang agama dan kepercayaan yang ada di Bali pada khususnya, serta diharapkan masyarakat memahami nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum yang berkaitan dengan Pancasila.

Kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat menghaturkan terima kasih, utamanya kepada tim penulis Kajian Pancasila Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali yang telah melaksanakan tugasnya, serta seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih, saran, dan pendapatnya, sehingga buku ini layak untuk digunakan.

“Tidak ada gading yang tak retak”, demikianlah ungkapan pepatah, bahwa kesempurnaan itu milik Tuhan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Denpasar, 12 Juni 2019
Ketua Umum Pengurus Harian
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat

Mayjen TNI Purn. Wisnu Bawa Tenaya



NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ZAMAN PRAHINDU DAN HINDU DI BALI

Anak Agung Gede Raka

Kearifan Lokal Prasejarah

Perjalanan zaman prasejarah Indonesia sejak zaman hidup berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sampai kepada berakhirnya zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut menghabiskan waktu yang cukup panjang. Kemudian memasuki zaman bercocok tanam dengan pola hidup menetapnya terjadi revolusi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang sangat mendasar (fundamental) terjadi pada bidang mata pencaharian hidup, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Masyarakat yang awalnya mendapatkan sumber makanan dengan bergantung kepada alam (*food gathering*) berubah menjadi memproduksi sendiri (*food producting*) (Marwati, Djoened, 1984). Semua itu dapat terjadi tidak terlepas dari dukungan unsur-unsur lain yang terintegrasi menjadi satu kesatuan utuh, seperti: sistem teknologi, sistem pengetahuan, pranata sosial, sistem komunikasi (bahasa), dan tatacara (seni). Serta dalam sistem kepercayaan, selain telah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, tetapi juga berkembang kepercayaan terhadap pemujaan roh leluhur.

Kehidupan masyarakat menjadi semakin maju ketika memasuki zaman bercocok tanam akhir (zaman megalitik) yang berkembang bersamaan dengan zaman perunggu (perundagian). Ciri utama dari masa perundagian adalah

bahwa ketika itu telah muncul orang-orang yang memiliki kecakapan/ keahlian khusus (undagi) dalam pembuatan benda-benda dari perunggu dengan teknik *a cire perdue* dan *bivalve*. Berbagai hasil karya yang dihasilkan ketika itu dan sampai kepada kita saat ini, antara lain: nekara, bejana, alat-alat upacara keagamaan, dan berbagai peralatan dan perhiasan dari perunggu. Dalam bidang kepercayaan, pemujaan terhadap roh leluhur sangat dibesar-besarkan. Hal itu dilakukan karena ada kepercayaan bahwa roh leluhur mereka yang meninggal dianggap masih hidup di dunia lain (akhirat). Sebagai indikasi ke arah itu dikuatkan oleh berbagai warisan budaya yang ditinggalkan, seperti: punden berundak, sarkopagus, peti batu, kubur batu, dolmen, menhir, arca perwujudan nenek moyang, dan lain-lain. Khususnya dalam sistem penguburan menggunakan sarkopagus.

Suatu hal menarik, bahwa tidak jarang di dalam sarkopagus juga didapatkan benda-benda bekal kubur yang dibuat dari perunggu. Berdasarkan kenyataan seperti itu, dapat memberi petunjuk bahwa zaman megalitik berkembang bersamaan dengan perunggu. Warisan terpenting dari perunggu adalah nekara, dan salah satu di antaranya ada di Bali dan saat ini tersimpan di Pura Penataran Sasih Pejeng, Gianyar, yang oleh masyarakat setempat disebut “Bulan Pejeng”. Nekara Pejeng merupakan nekara terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia (Ardika, 2017). Nekara Pejeng tidak hanya berukuran besar, namun juga sangat unik, baik dari sisi bentuk maupun ragam hiasnya. Bahkan lebih menarik adalah mengelompokkan nekara Pejeng ke dalam tipe lokal, karena didukung adanya penemuan alat cetak nekara di Manuaba (Tegallalang, Gianyar). Hal itu menguatkan bahwa nekara Pejeng hasil karya masyarakat lokal. Dengan demikian tidak berlebihan bila warisan Nekara Pejeng dikatakan sebagai bukti awal peradaban Bali (Raka, 2017). Artinya, kehidupan prasejarah Indonesia mengalami masa puncak pada zaman

logam (perunggu) dan berkembang bersamaan dengan zaman megalitik. Seperti diketahui, bahwa zaman Perunggu di Indonesia berlangsung sampai menjelang akhir abad sebelum masehi (Marwati Djoened, 1984). Dengan demikian Nekara Pejeng setidaknya telah berumur 2.000 tahun.

Bila disimak sejarah perjalanan panjang pertumbuhan dan perkembangan budaya masyarakat sejak masa bercocok tanam hingga berakhirnya zaman perundagian (perunggu), melahirkan gagasan kolektif dan menjadi unsur-unsur budaya asli atau nilai kearifan lokal. Unsur-unsur budaya yang dimaksud, antara lain: Kepercayaan terhadap gunung dan laut sebagai dua unsur yang berbeda (*cosmological dualism*); sistem pemujaan roh leluhur; tempat suci punden berundak-undak; Mata pencaharian hidup masyarakat bertani (agraris), dengan struktur masyarakat yang teratur. Bagi masyarakatnya yang tinggal di pesisir pantai (maritim), mereka hidup sebagai pelaut ulung dan sanggup mengarungi samudra lepas dengan menggunakan perahu bercadik. Sebagai pelaut yang ulung, tentu sudah mengetahui cuaca dan menguasai arah angin, serta mengenal ilmu perbintangan (ilmu falaq). Mereka juga mengenal perdagangan dan mata uang; tenunan dan pakaian; dan kesenian. Semua unsur budaya yang dimaksud telah mengakar kuat di seluruh masyarakat lokal nusantara dan kini masih ada di Bali. Dapat mengakar kuat, karena diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Dengan mengambil contoh konsepsi B. Malinowski, bahwa semua unsur budaya asli tersebut di atas dapat merepresentasikan tujuh buah unsur kebudayaan universal (Kontjaraningrat dalam Alfian, ed., 1985: 102). Atau sebaliknya, bahwa unsur-unsur budaya asli yang menginspirasi tujuh unsur kebudayaan universal tersebut. Dikatakan demikian, karena yang dimaksud unsur-unsur kebudayaan universal adalah semua unsur tersebut ada di mana-mana, baik pada masyarakat primitif, sederhana, dan terisolir maupun pada

masyarakat modern, kompleks, dan perkotaan. Sebagai contoh, di bidang: (1) bahasa: dalam berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa lisan; (2) sistem teknologi: pada saat itu sudah ada orang-orang yang memiliki keahlian khusus (undagi), seperti keterampilan menuang logam; (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi: sebagian besar masyarakatnya hidup dengan pertanian (agraris), melaut (maritim), dan perdagangan; (4) organisasi sosial: pada saat itu masyarakatnya telah hidup dalam susunan organisasi sosial yang teratur; (5) sistem pengetahuan: dalam menentukan hari baik untuk bercocok tanam bagi para petani dan pelaut, mereka menggunakan ilmu perbintangan (astronomi); (6) religi: mereka telah mengenal sistem pemujaan kepada roh leluhur dengan menggunakan media punden berundak-undak, sistem penguburan dengan sarkopagus, dan keyakinan terhadap adanya dua hal yang berbeda (*cosmological dualisme*); dan (7) kesenian: mereka telah mengenal seni membantik, seni gamelan (musik), dan seni pertunjukan wayang.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kearifan Lokal Prasejarah

Di depan telah dipaparkan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki beberapa unsur budaya asli menjelang berakhirnya masa prasejarah, yang oleh arkeolog asing H.G. Quaritch Wales (1948) yang pertama-tama melontarkan dengan istilah *local genius*. F.D.K. Bosch (1952) yang juga arkeolog dan banyak berjasa di bidang arkeologi klasik Indonesia memberi pembahasan lanjutan tentang *local genius* tersebut yang tampak mendekatkan pengertiannya pada pemikiran orang Indonesia dewasa ini, terkenal dengan *cultural identity* (Haryati Soebadio, dalam Ayatrohaedi, 1986: 18). Suatu hal menarik adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang baru lahir 1 Juni 1945, namun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya telah ada jauh sebelumnya dan telah membumi di seluruh nusantara. Tentu tidak berlebihan bilamana ada yang

mengatakan bahwa nilai-nilai budaya asli memberi kontribusi yang sangat *significant* kepada Pancasila. Untuk membuktikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila sudah ada pada kepribadian bangsa kita, kajian seksama terhadap unsur-unsur budaya asli (kearifan lokal) sangat penting dilakukan.

Sila Pertama

Ketuhanan Yang Mahaesa

Salah satu aspek penting dari unsur-unsur kearifan lokal Bali yang menjadi modal dasar dalam menerima pengaruh budaya Hindu di bidang keagamaan adalah aspek pemujaan roh leluhur. Tradisi pemujaan terhadap roh leluhur yang telah meninggal dan dianggap masih hidup di dunia akhirat mengalami masa puncaknya pada bercocok tanam akhir (Megalitik) dan berkembang bersamaan dengan zaman perunggu (perundagian). Pemujaan dilakukan dengan ritual keagamaan dengan tujuan memohon perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka yang telah ditinggal. Pemujaan terhadap roh leluhur merupakan media bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan ketaquaannya kepada Sang Pencipta di dunia mikro (roh leluhur).

Bentuk kepercayaan lainnya yaitu kepercayaan terhadap adanya dua kekuatan berbeda yaitu gunung dan laut (Marwati Djoened, 1984: 338). Kepercayaan terhadap gunung suci sebagai tempat tinggal roh leluhur ditunjukkan dengan dipilihnya gunung sebagai tempat membangun punden berundak-undak sebagai tempat sthana sementara roh leluhur. Konsep pemikiran yang melandasinya adalah gunung suci sebagai tempat tinggal roh leluhur. Unsur-unsur kekuatan alam lainnya, seperti: bulan, bintang, dan matahari, juga sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat agraris dan maritim. Di antara ketiga unsur kekuatan alam tersebut, bintang merupakan salah satu planit bumi yang dijadikan pedoman (penuntun) bagi para petani dalam menentukan

sistem (pola) tanam padi dan para pelaut ketika mengarungi lautan lepas untuk menangkap ikan. Hal itu menandakan bahwa para petani dan para pelaut telah menguasai ilmu perbintangan (*astronomi*).

Sila Kedua

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan seperti menghargai martabat, kewajiban, dan hak setiap orang dapat dilihat pada warisan budaya dari masa megalitik, salah satu di antaranya sarkopagus. Sarkopagus merupakan salah satu warisan untuk mengubur mayat, khusus untuk orang-orang tertentu yang dipandang berjasa dalam hidupnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kehormatan atas jasa-jasa yang diperbuat selama dalam pengabdian di masyarakat. Tradisi memberi penghargaan kepada seseorang yang dipandang memiliki kemampuan lebih untuk diabdikan kepada masyarakat merupakan wujud keadilan dalam memperlakukan dan mengakui hak atas kewajiban seseorang. Perlakuan seperti itu merupakan salah satu bentuk perbuatan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Demikian pula adanya sikap tenggang rasa dengan sesama warga diyakini sangat kuat dalam pola kehidupan masyarakat agraris. Suburnya sikap saling menghormati sesama tidak terlepas dari adanya kepentingan yang sama di antara warga terutama dalam mengerjakan sawah dan pekerjaan sosial lainnya yang tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri. Untuk itu, mereka harus hidup saling menghormati dan menghargai sesama warga, karena di antara mereka saling membutuhkan. Warisan sikap tenggang rasa seperti itu, saat ini masih dapat dilihat dan diamati di desa-desa yang tergolong tua, yang belum banyak tersentuh budaya luar, seperti: Sembiran, Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa, dan desa-desa tua lainnya. Berikut petikan wawancara dengan I Ketut Sudrama, salah seorang tokoh masyarakat

Desa Sembiran, dan menuturkan sebagai berikut:

Sikap tenggang rasa di desa kami sangat kuat, karena dianggap sebagai warisan tradisi dari leluhur. Hal itu tampak ketika ada salah seorang warga kami yang tertimpa bencana kematian. Warga semua hadir untuk ikut berbagi duka. Konsep pemikiran yang melandasinya, bahwa kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia maya, dan tidak mungkin kami bertemu kembali. Untuk itu warga kami berusaha hadir walaupun tidak diberitahu. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti: upacara pernikahan, kunjungan untuk orang sakit, dan lain-lain sebagai warisan masa prahindu masih hidup di Desa Sembiran. (Informan: wawancara pada Senin, 15 April 2019; di Ruang Sidang Mandapa Sri Kesari Warmadewa, Denpasar).

Sila Ketiga

Persatuan Indonesia

Pola hidup agraris dengan struktur masyarakat yang teratur sangat memberi peluang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam **struktur masyarakat teratur** sudah berkembang organisasi sosial yang dikendalikan oleh seorang pemimpin dalam mengendalikan roda pemerintahan. Siapa pun mereka yang dipercaya sebagai pemimpin tentu bukan orang sembarangan, namun mereka yang dipandang memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain. Nilai-nilai rasa persatuan dan kesatuan tampak pada semangat hidup dalam berorganisasi dengan segala konsekuensi atas kebersamaan tersebut. Persatuan dan kesatuan dibangun terinspirasi oleh ideologi bahwa persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan melalui kebersamaan. Hidup bersama, saling pengertian, saling bantu-membantu, dan saling menghagai hak dan kewajiban orang lain merupakan landasan kuat membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan.

Persatuan dan kesatuan yang kuat dapat diwujudkan tidak cukup berlandaskan kerjasama harmonis yang dibangun secara horisontal (sesama), namun juga kerjasama yang dibangun secara vertikal, yaitu kerjasama antara pemimpin dan yang dipimpin. Kekuatan dalam organisasi dapat dibangun dari berbagai sumber, kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan utuh dalam satu visi dan misi yang sama. Sebagaimana filosofi hidup yang dimiliki pohon beringin. Di manapun tanaman induk yang menurunkan akar-akar gantungnya ke dalam bumi yang subur yang menumbuhkan batang-batang baru yang berkembang menjadi raksasa-raksasa belantara yang besar (Bosch, 1983: 24). Artinya, persatuan dan kesatuan itu tetap kuat dan berkelanjutan dapat dibangun melalui kerjasama yang baik dan saling menghargai di antara semua pihak, baik secara horisontal (sesama yang dipimpin) maupun vertikal (antara pemimpin dan yang dipimpin).

Sila Keempat

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Inti daripada sila keempat adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai demokrasi tersebut sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang pada masyarakat prasejarah dengan **kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat**. Dalam struktur masyarakat yang teratur telah hadir calon-calon pemimpin untuk dapat dipilih yang terbaik di antara mereka sebagai seorang pemimpin. Siapa pun yang terpilih dan dipercaya untuk memimpin suatu organisasi, tentu telah melalui sebuah proses sesuai tradisi yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Serta mereka yang terpilih sebagai pemimpin tidak sembarangan, namun salah satu di antara mereka yang dipandang memiliki kemampuan lebih. Kehadirannya sebagai pemimpin diyakini telah memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni dalam

menggerakkan roda kepemimpinan. Hal itu mengindikasikan bahwa sistem demokrasi dalam organisasi telah berkembang dan berjalan dengan baik.

Sebagai implikasi positif dari sistem demokrasi dalam sebuah organisasi, secara tidak disadari dapat menginspirasi organisasi-organisasi lain yang berada di bawah naungannya. Sebagai bahan renungan untuk menggambarkan sistem demokrasi masa prasejarah, dapat dilihat keadaan sebuah organisasi di desa-desa yang tergolong tua yang masih taat dengan adat dan tradisinya. Sebagai contoh Desa Tenganan, misalnya. Keberadaan tradisi masa pra Hindu di desa tersebut masih hidup dengan subur sampai dengan saat ini, walaupun Hindu telah masuk di dalamnya. Para tokoh adat masih berkomitmen melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Pengabdianya kepada desa tidak perlu diragukan dalam mengemban misi untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhurnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada Hyang Pencipta, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Kelima

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kebiasaan masyarakat agraris dalam bekerja keras, seperti menebang hutan untuk pemukiman, sawah, ladang, dan kebutuhan lain telah ditanamkan sejak awal kehidupan bercocok tanam. Kebiasaan hidup seperti itu biasanya disertai dengan tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, dan semua itu telah menjadi bagian hidupnya. Semua kebiasaan tersebut sebagai indikasi bahwa nilai-nilai keadilan telah berkembang dalam masyarakat. Dengan penuh keyakinan bahwa semua kebiasaan tersebut memberi

kontribusi yang sangat signifikan terhadap nilai-nilai keadilan sosial sesuai diamanatkan dalam Pancasila.

Kearifan Lokal Pada Zaman Hindu

Dalam pergulatan waktu yang sangat panjang menjalani hidup terasing dari kemajuan yang telah dialami bangsa lain, akhirnya bangsa Indonesia secara berangsur-angsur dalam waktu yang tidak bersamaan mulai meninggalkan zaman prasejarah. Berdasarkan sumber data tertulis berupa prasasti yang sampai kepada kita, terungkap bahwa pengaruh Hindu yang membuka lembaran sejarah bangsa Indonesia (Kartodirdjo, 1975). Prasasti yang dimaksud adalah prasasti Kutai yang dikeluarkan atas perintah raja Mulawarman, anak Aswawarman, dan cucu Kundungga. Prasasti ditulis menggunakan hurup Pallawa berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti disebutkan pula pemujaan kepada dewa Ansuman (Matahari); menyebut tempat suci Waprakeswara (*Wapraka Iswara*: tempat suci untuk Dewa Siwa); serta menyebut Aswawarman sebagai *wamcakarta* (pembentuk keluarga). Penegasan Aswawarman sebagai pembentuk keluarga, memberi petunjuk bahwa Kundungga adalah orang Indonesia asli sebagai tokoh pertama penerima pengaruh Hindu.

Kehadiran agama dan budaya Hindu di Indonesia dapat diterima secara damai (*penetration pasific*), dan kemudian berakulturasi secara harmonis dengan budaya asli. Suatu hal menarik adalah bahwa daerah-daerah yang dicari sebagai tempat kediaman yang dihindukan ternyata tempat-tempat yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan dan Jawa Barat. Ketika terjadi perkembangan yang hebat di Jawa Tengah, kali ini pun tempat kedudukan kerajaan terletak di daerah pedalaman, di dataran Kedu dan Prambanan yang dikelilingi oleh gunung berapi dari segala penjuru dan sukar didatangi dari pantai (F.D.K Bosch, 1974: 18).

Sebagaimana diungkapkan Bosch, bahwa wilayah yang

dihindukan dipilih daerah-daerah yang berada di pedalaman. Hal yang sama juga terjadi pada masa selanjutnya ketika pusat kerajaan pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, pada masa Mpu Sindok, berlanjut zaman Kediri, Singosari, dan sampai kepada zaman Majapahit, pusat-pusat kehinduan dipilih di daerah-daerah pedalaman. Fenomena yang sama terjadi di Bali ketika zaman Bali Kuno, bahwa tempat yang dipilih sebagai pusat kehinduan berada di daerah dekat sungai, tepatnya di daerah aliran sungai (DAS) Pekerisan dan Petanu, dan desa-desa yang berada di antara kedua sungai tersebut, yaitu Desa Pejeng dan Desa Bedulu (Stutterheim, W.F, 1935; Kempers, A.J. Bernet, 1956).

Walaupun Hinduisme telah masuk di Indonesia dan Bali pada khususnya, sifatnya hanya menambah bentuk keyakinan dengan pemujaan kepada dewa-dewa sebagai manifestasi Tuhan. Namun dasar-dasar keyakinan yang telah dimiliki sejak masa pra Hindu masih kuat bertahan, bahkan dengan kekuatan yang dimiliki dapat membedakan dengan keberadaan agama Hindu di negeri asalnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sartono, dkk. (1975, 189), bahwa pengaruh zaman megaliticum di Bali masih sangat kuat dan bertahan sampai saat ini. Hal itu dapat dilihat pada bangunan-bangunan pura yang mirip punden berundak-undak. Kepercayaan kepada dewa gunung, dewa laut dan batu-batu besar masih tetap hidup terpelihara sampai Hindu masuk di Bali, dan bersamaan dengan arca-arca dalam agama Hindu. Yang menarik adalah di Trunyan Dewa Gede Pancering Jagat atau Batara Da Tonta masih tetap menggunakan unsur asli. Hal yang sama juga terjadi di Poh Asem, di mana sebutan dewa terpenting di pura tersebut masih tetap menggunakan nama asli, yaitu Betara Gede Batu Meregeg.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan menguatkan bahwa di tempat-tempat suci di Bali cukup banyak ditemukan warisan budaya dari pra Hindu dan

warisan Hindu berupa arca-arca dipuja bersama-sama dalam satu tempat suci. Sebagai contoh, warisan Nekara dan ratusan arca-arca zaman Hindu, di Pura Penataran Sasih Pejeng, Gianyar; Sarkopagus dan beberapa arca-arca warisan zaman Hindu di Pura Sebilang Bukian, Payangan, Gianyar; Sarkopagus dan warisan arca-arca dari zaman Hindu di Pura Masceti Bukian Payangan, Gianyar; Nekara Pura Manik Liu, Kintamani, Bangli; warisan zaman megalitik di Pura Dasar Gelgel, Klungkung; bangunan punden berundak-undak di Pura Jumeneng Sanur, Denpasar; Pura Besakih dengan struktur bangunan punden berundak-undak, di Karangasem, dan lain-lain.

Sebagaimana di paparkan di atas, bahwa warisan yang ditinggal berasal dari zaman prasejarah (pra-Hindu) dan dari zaman Hindu, posisinya menyebar hampir di seluruh Bali, dan basisnya di Kabupaten Gianyar. Beraneka ragam bentuk dan fungsinya yang meliputi berbagai unsur budaya. Namun berdasarkan pengamatan seksama terhadap sumber data warisan yang ada di lapangan dan dilengkapi dengan studi pustaka, bahwa kebanyakan benda-benda warisannya berupa unsur-unsur kesenian dengan latar belakang keagamaan Hindu. Dengan melihat kenyataan seperti itu, terkesan bahwa sejarah kebudayaan Indonesia khususnya Bali cenderung kepada sejarah kesenian (Soekmono, 1984). Hal seperti itu juga yang tampak dalam pengamatan lapangan telah dilakukan, khususnya di DAS Pekerisan dan Petanu serta desa-desa yang ada di antara kedua aliran sungai tersebut, bahwa kebanyakan warisannya berupa seni bangunan dan seni arca.

Walaupun demikian, secara umum semua warisan budaya yang ada di Bali dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: warisan berupa benda (*tangible*) adalah berbagai benda hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya (BCB); dan warisan budaya tak benda (*intangible*) adalah

warisan budaya yang tidak dapat diraba dan bersifat abstrak (Edi Sedyawati, dalam Ardika, 2007: 19). Jumlah warisan yang cukup banyak dan keberadaannya menyebar di seluruh Bali, basisnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Pekerisan dan Petanu dan desa-desa yang berada di antara kedua DAS tersebut.

Dalam upaya penelusuran kontribusi nilai-nilai kearifan lokal Bali Hindu terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, sumber data yang dijadikan bahan kajian diambil secara selektif yang dipandang dapat mewakili periode waktu (zaman) masing-masing. Ketika berbicara masalah warisan budaya, peran penguasa yang mengendalikan roda pemerintahan dalam setiap masa kepemimpinannya sangat penting. Prasasti merupakan sumber data utama dalam upaya penyusunan sejarah masa lalu. Dikatakan demikian, karena dalam prasasti, selain menyebut nama raja, pusat kerajaan, tahun pemerintahan, juga tidak jarang di dalamnya menguraikan hal-hal penting lainnya berkenaan dengan kehidupan agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain. Tentu tanpa mengabaikan peranan tinggalan arkeologi lainnya, yaitu artefak, ekofak, dan sumber-sumber lainnya.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Warisan Arkeologi

Warisan arkeologi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada warisan yang berupa prasasti dan warisan seni rupa (seni bangunan dan seni arca), dan warisan lainnya. Khususnya warisan dalam bentuk prasasti jumlahnya cukup banyak dan menyebar hampir di seluruh Bali serta berasal dari berbagai periode. Berbicara prasasti berhubungan erat dengan penguasa yang mengendalikan pemerintahan ketika prasasti tersebut diturunkan. Suatu hal menarik, bahwa prasasti-prasasti yang ditemukan dari masa sebelum Sri Kesari Warmadewa (913 M) tidak ada yang menyebut adanya nama raja yang mengeluarkan prasasti. Selanjutnya sejak pemerintahan raja-raja dari dinasti Warmadewa berawal

dari Sri Kesari sampai dengan runtuhnya dinasti tersebut ketangan Majapahit, perjalanan sejarah Bali menjadi lebih jelas. Dikatakan demikian, karena semua raja menurunkan prasasti, dan isinya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting yang telah dilakukan dalam masa pemerintahannya.

Berdasarkan studi pustaka, ternyata cukup banyak tinggalan arkeologi berupa prasasti, baik dari masa sebelum dinasti Warmadewa maupun dari masa pemerintahan raja-raja dari dinasti Warmadewa. Dalam bentangan waktu 4 (empat) abad lamanya (abad ke-10 M — ke-14 M), tidak kurang dari 20 orang raja yang tampil sebagai pengendali roda pemerintahan, dan lebih dari 100 buah prasasti yang diwariskan dan sampai kepada kita saat ini. Namun dalam kajian kali ini, penulis menggunakan sistem sampling, yaitu dengan mengambil beberapa prasasti yang diturunkan oleh raja-raja Bali Kuna yang dapat dijadikan bukti bahwa Pancasila telah membumi pada masa Bali Kuna.

Selanjutnya warisan dalam bentuk seni rupa (seni bangunan dan seni arca), bahwa daerah yang paling banyak menyimpan warisan adalah Kabupaten Gianyar dan pusatnya di daerah aliran sungai (DAS) Pekerisan dan Petanu, dan desa-desa yang berada di antara kedua DAS tersebut, yaitu Desa Pejeng dan Bedulu. Bila dikelompokkan berdasarkan bentuk atau wujudnya, sebagian besar warisannya dalam bentuk seni arca. Karena jumlahnya cukup banyak, kemudian Stutterheim mengelompokkan berdasarkan periode waktu pembuatannya menjadi 4 (empat), yaitu: Hindu Bali (8-10M), zaman Bali Kuna (10-13 M); zaman Bali Tengah (13-14 M); dan Benda-benda yang tiada dapat diberi penanggalan (Semadi Astra, 2013: 3). Pada paparan berikut, selain menguraikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam prasasti, namun juga nilai-nilai yang tersembunyi di balik warisan seni rupa (seni arca dan seni bangunan).

Sila Pertama

Ketuhanan Yang Mahaesa

Prasasti Blanjong merupakan salah satu dari tiga buah prasasti yang diturunkan oleh Adipatih Sri Kesari Warmadewa. Prasasti menggunakan dua macam bahasa (*bilingual*) dan dua macam huruf. Pada bagian yang menggunakan huruf Pranegari berbahasa Bali Kuna, dan bagian yang menggunakan huruf Kawi berbahasa Sanskerta. Prasasti berangka tahun 835 C/ 913 M; menyebut nama kraton, Singhadwalapura; dan disebutkan pula bahwa raja telah berhasil menundukkan musuh-musuhnya, yaitu Gurun dan Swal (Marwati Djoened, 1984). Suatu hal yang patut diapresiasi adalah penggunaan huruf Prenagari; bahasa Sanskerta; nama raja berakhiran *warman*, semua itu menunjukkan unsur-unsur pengaruh India.

Dengan adanya unsur-unsur Hindu (India) seperti terungkap dalam prasasti, dapat memberi gambaran bahwa tradisi keagamaan Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu yang telah lebih awal masuk ke Indonesia, seperti di Kutai, Kalimantan Timur (4 M); Tarumanegara, Jawa Barat (5 M); dan Canggal, Jawa Tengah (8 M). Kutai, Kalimantan Timur, sebagai daerah pertama mendapat pengaruh Hindu, bahwa pada saat pendirian prasasti (yupa) di sebidang tanah suci yang diberi nama Waprakeswara, jelas pada saat peresmian ditandai dengan ritual keagamaan. Peristiwa penting seperti itu kemudian dikenal kembali di pulau Jawa (Jawa Barat) sebagai Baprapakeswara, merupakan tempat suci yang selalu disebut berhubungan dengan dewa besar tiga, yakni Brahma-Wisnu-Siwa (Marwati Djoened, 1984: 36). Kemudian pendirian Lingga sebagai media pemujaan kepada Siwa, di Desa Canggal oleh Sanjaya (732 M) (Sartono, 1975), dilakukan sebagai bentuk perhormatan kepada Siwa. Rupanya hal seperti itu pula yang dilakukan pada saat peresmian prasasti (tugu) Belanjong, Sanur. Artinya, Sri Kesari sebagai cikal-bakal raja-raja Bali Kuna dari dinasti Waramdewa juga

menganut agama Hindu dengan memuja Siwa.

Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Berdasarkan atas temuan tinggalan seni arca dan prasasti yang berasal dari periode sebelum pemerintahan Sri Kesari, seperti arca Siwa di Pura Putra Betara Desa Bedulu, Gianyar, yang menunjukkan Balinisme di samping bagian-bagian yang bersifat Jawa Tengah (Sailendra) (Stutterheim, t.t., 49). Artinya, pada abad ke-8 M di Bali sudah mengenal pemujaan kepada Siwa sebagai manifestasi Tuhan. Dari sumber prasasti, yaitu prasasti Sukawana, Kintamani, Bangli (804 S/ 882 M), yang di dalamnya dengan jelas menyebutkan tiga tokoh agama Siwa, yakni: Siwakangsita, Siwapradnya, dan Siwanirmala (Goris, 1951/ 1952, 53). Sudah jelas bahwa ketiga tokoh agama tersebut adalah sebagai penganut agama dan pemuja Siwa. Selanjutnya prasasti Trunyan B (833 S/ 911 M), yang di dalamnya ada menyebutkan tentang pemujaan kepada Sanghyang di Turunyan (Goris, 1951/ 52: 58), sebagai manifestasi Hyang Maha kuasa.

Suatu hal patut dicatat, walaupun pengaruh Hindu memperkenalkan konsep keyakinan terhadap dewa-dewa sebagai manifestasi Tuhan, namun nilai-nilai kearifan lokal tentang sistem tatacara dan upacara keagamaannya masih tetap sesuai tradisi lokalnya. Hal itu yang membuat Hindu di Bali secara kasat mata berbeda dengan Hindu di negeri asalnya. Demikian pula dewa-dewa pujaan yang telah ada sejak zaman prasejarah (pra-Hindu) masih tetap bertahan, bahkan berakulturasi secara harmonis dengan konsep keyakinan terhadap dewa-dewa dalam agama Hindu tanpa menghilangkan nilai-nilai asli. Sebagai contoh, nama dewa pujaan masyarakat *bali mula* (Bali asli) di desa Trunyan yang dikenal dengan sebutan *Betara Da Tonta* masih tetap

menggunakan unsur asli (Sartono, 1975: 190).

Hormat menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup

Sikap saling menghormati antar umat telah dibina sejak awal masuknya pengaruh Hindu di Bali. Untuk diketahui bahwa selain agama Hindu, ketika itu juga telah berkembang agama Budha. Hubungan baik antara kedua agama tersebut dapat dilihat dari warisan budaya yang ditinggalkan, seperti di Pura Pegulingan, Tampaksiring (898 C/ 976 M) (I Made Suantra dkk, 2006: 21) dan tinggalan berupa reruntuhan bangunan stupa di Goa Gajah Bedulu, Blahbatuh yang sezaman dengan tugu Belanjong (abad ke-10 M) (Kempers, 1991: 126) dan keduanya berada di Kabupaten Gianyar. Keberadaan warisan dalam satu lokasi dari latar belakang agama berbeda seperti di Pegulingan dan Goa Gajah, menunjukkan bahwa antara agama Hindu dan Budha dapat hidup berdampingan secara damai.

Sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan umat berbeda terus berlanjut hingga berakhirnya zaman Bali Kuna, zaman Kerajaan Gelgel, bahkan dibangun semakin erat seperti yang tampak di lapangan dewasa ini. Hubungan baik antara agama Hindu dan Budha sebagai warisan zaman Bali Kuna dan masih tetap eksis sampai saat ini adalah penggunaan *sulinggih* dari pendeta Siwa (Hindu)-Budha-Senggu (Empu) ketika ada upacara keagamaan yang tergolong besar di *kahyangan Tiga, dang kahyangan*, dan *kahyangan jagat*. Kemudian hubungan antar umat yang lebih luas antara seluruh umat yang ada di Bali tercermin dalam bentuk bangunan suci. Sebagai contoh di Nusa Dua, Kabupaten Badung, misalnya. Dalam satu kawasan suci “Puja Mandala” dibangun tempat peribadatan untuk kebutuhan umat dari masing-masing agama, seperti: Pura, Masjid, Gereja Katolik, Gereja Protestan,

Vihara, dan Klenteng. Fenomena seperti itu menandakan bahwa hubungan antar umat di Bali sangat harmonis. Artinya, Bali yang masyarakatnya mayoritas beragama Hindu tetap menghargai umat beragama lain, termasuk kepada para penganut kepercayaan.

Sila Kedua

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sifat menghagag nilai-nilai kemanusiaan merupakan warisan tradisi budaya masa pra Hindu. Kebiasaan menghargai warisan nilai luhur budaya masa lalu sangat kuat. Fenomena yang menunjuk ke arah kekuatan mental orang Bali dalam mempertahankan warisan budaya leluhur dapat dilihat di desa-desa tua seperti di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, tradisi makan sirih di desa Sidatapa Buleleng, misalnya. Sampai dengan saat ini budaya makan sirih masih eksis bagi kalangan para orang tua. Kebiasaan seperti itu dianggap sebagai warisan leluhur, sehingga tetap dipertahankan walaupun zaman telah berubah. Kekuatan mempertahankan budaya asli juga terdapat di desa Penglipuran Bangli. Masyarakat desa Penglipuran memiliki komitmen tinggi untuk menghindari dari pengaruh poligami. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan “*karang memadu*” sebagai tempat bagi mereka yang melanggar tradisi monogami belum tersentuh sama sekali sampai detik ini. Demikian pula di desa Tenganan Karangasem, di mana berbagai tradisi unik yang menyertai tradisi *geret pandan* masih kuat bertahan hingga saat ini. Tentu masih banyak desa-desa lainnya di Bali yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya.

Semua sikap dan perilaku yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagaimana dipaparkan di atas, mengindikasikan bahwa mereka sangat beradab. Dikatakan demikian, karena memiliki kekuatan mental dalam mempertahankan kearifan lokal di

tengah-tengah derasnyanya arus budaya global. Namun mereka juga berlaku adil dalam menyikapi perkembangan zaman. Artinya, selain memiliki fanatisme dalam mempertahankan budaya lokal, mereka juga terbuka menerima kehadiran tradisi budaya luar. Dengan catatan, tetap selektif memilih dan menyesuaikan dengan alam pikiran dan perasaan budaya asli. Untuk lebih jelas, pada bagian berikut disajikan paparan tentang kontribusi nilai-nilai kearifan lokal Bali terhadap Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sifat merasa dengan diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sebagai indikasi ke arah itu, ditunjukkan oleh adanya hubungan baik dengan bangsa Tinghoa dan Bali sejak zaman Perunggu (2000 tahun silam), yang meninggalkan warisan budaya berupa Nekara, saat ini disimpan di Pura Penataran Sasih Pejeng, Gianyar (Marwati Djoened, 1984). Kemudian memasuki abad ke-8 M, Bali menjalin hubungan baik dengan India yang diberi persaksian oleh warisan seni arca Siwa dan diperkuat dengan kehadiran para tokoh agama, seperti Siwakangsita, Siwapradnya, dan Siwa Nirmala sebagaimana disebut dalam prasasti Sukawana. Serta lebih diperjelas lagi, hubungan Sri Kesari dengan India tahun 835 S/ 913 M, sebagaimana dipahatkan pada prasasti Belanjong. Kemudian pada masa pemerintahan raja Jayapangus abad 12 M, hubungan Bali dengan Cina bangkit kembali dengan meninggalkan warisan berupa benda-benda keramik, tari baris Cina, cerita Sampik dan Nyonya Intai, dan lain-lain.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

Sumber yang menguraikan bahwa orang Bali gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan dapat diketahui dari prasasti Manukaya (962 M). Dalam prasasti ada dijelaskan

tentang keberadaan situs “*tirtha di air ampul*” (Tirta Empul) yang dipakai mengairi subak Kumba dan Subak Pulagan yang setiap tahun dilanda banjir. Kemudian raja memerintahkan untuk memperbaiki tanggul di Tirta Empul (Goris, 1951/ 1952). Kegiatan memperbaiki dan memelihara tanggul merupakan kegiatan mulia untuk membantu para petani sawah yang memanfaatkan air sebagai sarana dalam bercocok tanam. Bentuk kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti menengok tetangga, sahabat kerja, warga sekampung yang sedang berduka.

Mengakui persamaan derajat

Mengakui adanya persamaan derajat dapat diketahui dari sumber prasasti yang diketemukan dari tahun 804 S (882 M) sampai dengan tahun 836 S (914 M) yang di dalamnya menyebutkan keberadaan para senapati dalam struktur pemerintahan yang disebut *panglapuan* (Sartono Kartodirdjo, 1975: 164). Kemudian pada masa pemerintahan Udayana dan Gunapriyadarmapatni, badan Penasihat Pusat itu disebut dengan istilah “*pakira-kiran i jro makabehan*”, dengan beranggotakan para senapati dan Pendeta Siwa dan Budha. Mereka duduk bersama tanpa membedakan derajat dalam mengemban tugas dan kewajibannya mendampingi raja (Marwati Djoened, 1984: 316). Sikap mengakui adanya persamaan derajat berlangsung terus sampai masa pemerintahan Raja Jayapangus. Para pejabat yang mendampingi raja dalam mengendalikan roda pemerintahan adalah: para senapati, para tanda rakryan, para pendeta dari agama Siwa dan Budha, para resi dan Brahmana Agung (Budiastira, 1978: 12), dan berlanjut terus pada masa pemerintahan raja-raja penggantinya.

Dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu, pendeta besar agama Siwa dengan gelar Dang Acarya (D.A.) jumlahnya paling sedikit 21 orang, sedangkan pendeta

besar agama Budha dengan gelar Dang Upadhyaya (D.U.) hanya 4 orang. Yang menarik adalah, jabatan Dang Acarya dan Dang Upadhyaya tidak merupakan monopoli para pendeta istana saja, tetapi pejabat-pejabat lainnya, seperti *Samgat*, *Rama kabayan*, *Dewakarma* pun boleh juga menggunakan gelar tersebut (Sartono, 1975: 174). Artinya, bahwa pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu, sang raja tidak melakukan diskrimasi dalam pemberian jabatan. Tampaknya raja Anak Wungsu dalam hal pembagian jabatan lebih mengedepankan profesionalisme. Dalam prasasti yang dikeluarkan beliau disebut-sebut sebagai raja yang belas kasihan dan diidentikan dengan dewa Wisnu (Marwati Djoened, 1984: 301). Pada masa pemerintahannya keadaan Bali aman dan tenteram. Hal itu disebabkan oleh sifat raja yang tidak pilih kasih, sehingga beliau sangat dicintai oleh rakyatnya.

Sila Ketiga

Persatuan Indonesia

Salah satu organisasi sosial yang lahir pertama dalam kehidupan masyarakat agraris adalah organisasi profesi yang berurusan dengan irigasi (pengairan). Persoalan irigasi merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan dunia agraris yang telah berkembang sejak masa bercocok tanam. Karena pentingnya persoalan irigasi bagi masyarakat agraris, tentu membutuhkan strategi pengelolaan secara profesional. Ketika datang pengaruh Hindu dengan memperkenalkan sistem pemerintahan kerajaan, setiap raja yang mengendalikan roda pemerintahan melirik keberadaan organisasi profesi tersebut. Keberadaan seperti itu dapat membuat organisasi profesi tersebut semakin berkembang. Ketika masa pemerintahan raja Udayana, keberadaan organisasi kemasyarakatan sudah lebih lengkap dibanding masa-masa sebelumnya. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud antara lain adalah: *wanua* (daerah), *karaman* (desa), *thani* (kampung),

dan *anak thani* (anak kampung) (Sartono Kartodirdjo, 1975: 177). Pada bagian berikut diuraikan kontribusi nilai-nilai kearifan organisasi sosial dimaksud terhadap Sila Ketiga dari Pancasila: Persatuan Indonesia.

Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

Wujud kebersamaan yang diperkuat dengan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kepentingan untuk keselamatan organisasi. Sebagaimana diketahui, bahwa mata pencaharian hidup pokok pada masa Bali Kuna adalah bertani, berkebun, dan menangkap ikan, dan pekerjaan sampingan lainnya. Dengan demikian, dalam mengurus irigasi dan pengolahan tanah pertanian tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri-sendiri, dan membutuhkan kebersamaan. Persatuan dan kesatuan yang kuat dibangun berlandaskan kepada rasa kebersamaan. Persatuan dan kesatuan yang mulanya dibangun dalam organisasi yang berdasarkan kepentingan kepentingan yang sama (disebut *kasuwakan*/ subak sejak zaman Marakatta), kemudian berkembang pada bentuk-bentuk pekerjaan lainnya yang sifatnya multi kepentingan, seperti kegiatan adat, keagamaan, kesenian, dan pekerjaan sosial lainnya di bawah organisasi banjar, kampung (*thani*), desa (*karaman*), daerah (*wanua*), dan organisasi lainnya.

Persatuan dan kesatuan semakin tampak ketika raja sebagai pengendali pemerintahan dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat monumental, sebagai contoh pekerjaan membangun candi, seperti: candi Mengening, zaman Udayana (abad ke-11 M); candi Gunung Kawi, zaman Anak Wungsu (abad ke-11 M) (Goris, 1951/ 1952), candi Pengukur-ukuran, Jayapangus (abad ke-12 M) (Budiastra, 1978), dan lain-lain. Semua pekerjaan besar tersebut sudah jelas membutuhkan berbagai tenaga kerja dengan latar belakang kemampuan (profesional) yang berbeda. Semua

warisan yang ditinggalkan kepada kita saat ini, semua dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik dilandasi rasa pesatuan dan kesatuan masyarakat yang kuat. Ketulusan mereka dalam mengabdikan diri kepada negara (kerajaan), sebagai ungkapan balas jasanya kepada pemimpin (raja) atas keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan dirasakan dalam hidupnya. Untuk memelihara rasa persatuan dan kesatuan, dibutuhkan kesadaran tinggi dari setiap anggota organisasi, dengan cara melepas kepentingan individu dan kelompok ketika dihadapkan dengan kepentingan yang lebih luas. Nilai-nilai sikap dan perilaku seperti itu telah ditanamkan sejak masa prasejarah sampai dengan zaman Hindu dalam kelompok masyarakat yang lebih luas.

Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

Budaya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tercermin dalam kehidupan sosial, dan telah menjadi bagian hidup dari masyarakat Bali. Dalam mengaktualisasikannya dapat dilakukan secara individu maupun dalam kelompok. Bagi umat Hindu di Bali, motto mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu dan golongan (*anresangsya mukhyaning dharma*) sudah merupakan sebuah mitos. Hal itulah yang menyebabkan kegiatan gotong-royong sebagai media pengabdian kepada bangsa dan negara sangat kuat dan dapat bertahan hingga saat ini di Bali. Benny H. Hoed (2011: 121) mengungkapkan, bahwa kegiatan gotong-royong sudah dianggap bagian dari tradisi kita selama bertahun-tahun. Gotong-royong bermakna denotasi, yaitu bekerja sama dan saling membantu untuk mengerjakan sesuatu, khususnya untuk sesuatu yang bermakna sosial, seperti pembangunan masjid, pembuatan jalan desa, atau pemadaman kebakaran.

Sebagaimana diungkapkan Hoed, tampaknya seperti itu pula yang terjadi di Bali. Bahwa gotong-royong sifatnya

lebih mengarah kepada pengabdian yang diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti gotong-royong memperbaiki dan memelihara jalan desa, pembangunan tempat suci (pura), dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Kegiatan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara yang dapat dilaksanakan secara gotong-royong dalam bentuk kegiatan non fisik fisik, seperti menyukseskan kegiatan Pilpres, Pileg, Pilkada, Pilgub, pilbup, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap gotong-royong dari perspektif rasa kebersamaan. Artinya, gotong-royong tidak hanya dalam bentuk kegiatan sosial, namun juga dapat dilakukan melalui kegiatan politik, dengan jalan kebersamaan menyampaikan aspirasi melalui penggunaan kartu suara. Pemilu, pemilukada, dan bentuk-bentuk kegiatan pemilihan lainnya, merupakan salah satu bentuk pengorbanan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika

Hubungan baik yang dibangun dalam pergaulan antar individu, antar kelompok, dan antar suku yang berbeda (berbhinneka) dapat dikatakan sebagai embrio dari lahirnya rasa kebersamaan dan menjadi landasan yang kuat untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan. Orang Bali Hindu, terkenal suka dan mudah bergaul dengan siapa dan di mana saja mereka berada. Dewasa ini orang Bali hampir menyebar di seluruh nusantara. Orang Bali dikenal sangat ramah dan suka bergaul. Sebagai petunjuk ke arah itu, orang Bali yang transmigrasi di desa-desa di beberapa daerah di Indonesia, seperti: di Pulau Sumatera, Pulau Bangka Belitung, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan, sebagian besar mengatakan sangat senang di daerah transmigrasi. Bahkan mereka mengungkapkan bahwa sudah dapat menikmati hidup dengan baik di daerah transmigrasi bergabung dengan

saudara-saudaranya dari Bali.

Sila Keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan/ perwakilan

Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat dapat dilihat dari warisan karya seni bangunan yang bersifat monumental, seperti: Pura Besakih, Karangasem, pura terbesar sebagai induk dari semua pura di Bali; candi Mengening Tampaksiring, sebagai *pedharmaan* Udayana (abad ke-11 M); candi Gunung Kawi sebagai *pedharmaan* Raja Anak Wungsu (abad ke-11 M); Goa Gajah Bedulu, Blahbatuh (abad ke-11 M); bangunan candi dan goa pertapaan Pura Pengukur-ukuran Pejeng, Tampaksiring (abad ke-12 M), yang dihubungkan dengan pemerintahan Raja Jayapangus; dan lain-lain. Semua bangunan tersebut dapat diwujudkan tidak terlepas dari peran penguasa yang mengendalikan roda pemerintahan, peran para seniman (arsitek) sebagai perancangnya, serta peran tenaga teknis yang mengerjakannya.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

Dalam merencanakan sebuah karya besar seperti tersebut di atas telah menjadi prinsip suatu organisasi untuk mengedepankan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Peran raja dalam persidangan adalah sangat penting untuk mendengarkan pandangan para dangacarya dan senapati untuk mendapatkan kata mufakat sebelum megambil keputusan. Beberapa hal penting yang patut mendapatkan apresiasi adalah berkaitan dengan bentuk dan fungsi bangunan, serta keterlibatan dari mereka yang profesional di bidangnya, seperti arsitek, teknisi, praktisi, tokoh agama, dan tenaga ahli lainnya, termasuk keterlibatan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengambil pekerjaan berat. Sebuah pengambilan

keputusan berdasarkan musyawarah telah menjadi kebiasaan pada masa Bali Kuna, terlebih dalam merencanakan pekerjaan besar sebagaimana disebutkan di atas.

Betapa pentingnya arti musyawarah dilakukan sebelum mengambil sebuah keputusan, terlebih keputusan politik bersangkutan dengan keamanan sebuah kerajaan pada umumnya, dan keamanan masyarakat desa pada khususnya. Sebagai salah satu contoh bentuk musyawarah yang diadakan ketika masa pemerintahan raja Jayapangus tentang kasus yang menimpa Desa Landih. Peristiwa tersebut diketahui dari prasasti Penida Kaja yang diturunkan pada masa akhir pemerintahannya tahun 1103 S/1181 M, ada menguraikan pentingnya musyawarah sebelum mengambil keputusan, yaitu sebagai berikut:

“... kesusahan penduduk desa, mereka bingung tidak tahu daya upaya, dalam bertukar pikiran dengan *sang admak akmitan apigajih* yang dilaksanakan tiap-tiap bulan *cetra*. Karena raja kecewa setelah mendengar peristiwa tersebut, raja menurunkan perintah kepada para senapati untuk dilanjutkan kepada para rakryan di depan persidangan lengkap istana, terutama beliau para pendeta dari agama Siwa dan Budha, para resi dan Brahmana Agung. Berdasarkan hasil permufakatan dalam persidangan menghasilkan penegasan dari raja, bahwa seluruh *paduka hajya* di desa Landih yang seharusnya mereka serahkan, boleh dijadikan milik mereka, dengan maksud menjaga keutuhan dan kesempurnaan desa Landih” (Budiastira, 1978: 12).

Tentu hal yang serupa juga dilakukan oleh Jayapangus ketika menghadapi pekerjaan besar seperti membangun candi Pengukur-ukuran. Raja sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan, sudah jelas bersikap sama dengan yang dilakukan

ketika menghadapi kasus pajak di desa Landih. Sebelum mengambil keputusan, yang pertama dilakukan adalah mengadakan musyawarah untuk mufakat, kemudian baru melangkah kepada tingkat pengambilan keputusan.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa bermusyawarah untuk mencapai mufakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di alam demokrasi. Kehidupan demokrasi pada masa pemerintahan ketiga raja tersebut sudah matang. Hal itu dapat diketahui dari sumber-sumber prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya yang dengan jelas menyebutkan tentang adanya struktur birokrasi pemerintahan sebagai penegak dan penyelenggara demokrasi. Sebuah lembaga pemerintahan "*pakira-kiran i jro makabehan*" yang beranggotakan para senapati, para pendeta Siwa dan Budha, para Brahmana, dan pejabat-pejabat bawahan lainnya. Bila ada permasalahan kerajaan, masyarakat, dan lain-lain yang dianggap berpengaruh terhadap keamanan negara (kerajaan), raja menurunkan perintah kepada para pejabat untuk bersidang. Hal itu penting dilakukan untuk mendapatkan kata sepakat sebagai bahan pertimbangan oleh raja dalam mengambil keputusan. Seperti masalah yang dialami penduduk desa Landih, ketika raja mendengar keluhan masyarakat, segera menurunkan perintah kepada para pejabat bawahannya untuk membahas permasalahan tersebut.

Pola-pola pengambilan keputusan berazaskan musyawarah mufakat diliputi semangat kekeluargaan juga dilakukan oleh raja-raja dalam membuat bangunan candi seperti tersebut di atas. Peran para pejabat sangat penting dalam sidang untuk mendapat kesepakatan yang nantinya disampaikan kepada raja sebagai landasan mengambil keputusan. Dengan melihat struktur bangunan candi sangat

proporsional sehingga menampilkan penampilan pisik yang sangat indah. Keberadaan seperti itu dapat memberi petunjuk bahwa arsitek dan tenaga kerja yang mengerjakan candi tersebut betul-betul memahami tentang asta kosali. Hal itu pula yang dilakukan oleh raja-raja Bali Kuna lainnya, bahwa apa pun keputusan yang diambil dalam mengambil pekerjaan besar lainnya, tentu berdasarkan atas musyawarah dan mufakat yang penuh dengan rasa kekeluargaan.

Sila Kelima

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Kebiasaan hidup warisan zaman pra Hindu, seperti tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan sikap adil menjadi semakin luas dan kompleks ketika telah hidup di zaman sejarah. Indikasi ke arah itu dapat dilihat pada warisan budaya, seperti seni bangunan candi, relief, kolam petirtaan, pembagian kerja berdasar keahlian, pekerjaan sosial, dan lain-lain yang sampai kepada kita saat ini. Berikut paparan nilai-nilai luhur sila kelima Pancasila.

Bersikap adil

Sikap adil tampak jelas pada organisasi banjar, desa, dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Hal itu terlihat pada saat pembagian pekerjaan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pekerjaan yang bersifat umum sasarannya kepada semua warga tanpa melihat profesi, golongan, pendidikan, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Seperti gotong royong pembuatan balai desa, memperbaiki lingkungan, kerja bakti di tempat suci, dan sejenisnya, diwajibkan untuk semua warga tanpa kecuali. Kemudian pekerjaan yang membutuhkan tenaga profesional (skil dan keahlian), seperti membangun candi, membuat arca/ patung, kolam petirtaan, relief, dan lain-lain, niscaya dipilih mereka yang keahlian di bidangnya

masing-masing. Sebagai wujud keadilan, bagi mereka yang tidak memiliki keahlian tertentu, diberikan tugas mengambil pekerjaan yang tidak membutuhkan profesi. Artinya, pekerjaan yang dapat diambil oleh siapa pun dan terlepas dari *skill* dan keahlian.

Berhasilnya membangun candi Mengening, candi Gunung Kawi, candi Pengukur-ukuran, petirtaan Goa gajah, arca-arca yang ribuan jumlahnya dan lain-lain tentu membutuhkan keahlian khusus. Karena semua bangunan yang serba monumental seperti tersebut di atas, tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam hal pemberian tugas oleh sang pemimpin tentu sudah berdasarkan atas keahlian yang dimiliki. Kemudian dengan melihat hasil karya yang ditinggalkan selain monumental dan sangat indah, diyakini pula bahwa pekerjaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian, tetapi juga tenaga kerja lainnya. Pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus inilah yang diambil oleh mereka pada umumnya. Sebagai contoh hasil karya seni yang ditinggal karena sikap adil sang pemimpin dalam mengendalikan pemerintahan, di antaranya: Raja Udayana Warmadewa adalah raja Bali Kuna yang berhasil mengantarkan Bali kepada zaman keemasannya dan mewariskan candi Mengening (Ardhana, dkk, 2013); Raja Anak Wungsu, dikenal sebagai raja yang selalu menyejaterakan rakyatnya (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984) yang mewariskan candi Gunung Kawi; raja Jayapangus, dikenal sebagai raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, yang meninggalkan candi Pengkur-ukuran dan goa pertapaan.

Menghormati hak-hak orang lain

Suatu hal yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada zaman Bali Kuna untuk menghargai hak seseorang, kelompok orang atau organisasi, salah satu di antaranya dapat diketahui

dari prasasti Serai A II yang dikeluarkan raja Udayana. Pada bagian (bait) III a, baris 2-5 ada menyebut “.....pembicaraan berkenaan dengan pajak Rot bagi mereka yang bekerja untuk raja di daerah peburuan. Beliau para Senapati, Ser, Nayaka, terutama para pendeta Siwa dan Budha, telah dua-tiga kali mempertimbangkan hal itu dalam pengambilan keputusan di persidangan perihal penderitaan mereka yang berbuat untuk di daerah se wilayah nayaka. Adapun keputusan yang diambil dan ditetapkan adalah perihal pembayaran mas 7 suwarna dan Panglyo 7 masaka, yang merupakan pengurangan yang ditetapkan oleh raja. Itulah ang diacu oleh beliau di persidangan, dan itulah yang dianugerahkan kepada mereka yaitu prasasti yang harus dijaga agar tetap ajeg.....” (Goris, 1951/52: 81).

Uraian di atas dengan jelas dapat diketahui, bahwa raja Udayana betul-betul memberikan perhatian atas kewajibannya menjaga keamanan wilayah milik raja, dikuatkan dengan menurunkan prasasti. Atas semua tugas yang dibebankan, mereka dibebaskan membayar pajak sesuai beban tugasnya.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain

Budaya Bali tidak dapat dilepaskan satu sama lain dengan agama Hindu, ibarat daging dan kulitnya yang sangat lekat dan sulit untuk memisahkannya. Dikatakan demikian, karena agama menjadi roh (spirit) dari kebudayaan Bali. Masyarakat Hindu Bali sangat kental dengan budaya saling menolong, baik antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok lain, maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Kebiasaan memberi pertolongan kepada orang lain sesungguhnya sudah ada sejak zaman pra Hindu dalam kehidupan agraris. Budaya agraris hidup terus berkelanjutan sampai dengan zaman Hindu dan bahkan sampai dengan saat ini. Demikian pula kebiasaan untuk

memberi pertolongan kepada orang lain. Artinya, budaya suka memberi pertolongan berakar dari masa pra Hindu dan berlanjut sampai zaman Hindu hingga saat ini. Dari suka memberi pertolongan kepada orang lain melahirkan tradisi tolong-menolong (gotong royong).

Dengan kehadiran agama Hindu yang menjadikan Weda sebagai sumber ajarannya, di mana dalam salah satu kitab Upanisad (Kena Upanisad) ada sebuah motto yang memberi inspirasi sifat saling tolong menolong tersebut "*Brahman Atman aikhyam*" (Tuhan dan atma adalah tunggal) (Gede Pudja, 1983: 18). Dari konsep inilah melahirkan "*Tat Twam Asi*" (kamu adalah saya). Kalimat kamu adalah saya atau saya adalah kamu ini dapat dimaknai sebagai sikap saling menghormati, saling tolong-menolong, saling menghargai, dan lain-lain. Begitu dalamnya makna dari ajaran "*Tat Twam Asi*" tersebut dan dijadikan pedoman hidup oleh umat Hindu. Karena hal itulah menyebabkan kehidupan tradisi tolong menolong menjadi semakin subur pada zaman Hindu dan bertahan kuat hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, ed. 1985. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Ardhana, I Ketut, dkk. *Raja Udayana Warmadewa*. Pemerintah Kabupaten Gianyar-Pusat Kajian Bali Universitas Udayana. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ardika, I Wayan. 1997. *Pusaka Budaya & Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ardika, I Wayan. 1998. *Prasasti-Prasasti Raja Udayana: Teks dan Terjemahan*.
- Bosch, F.D.K. 1974. *Masalah Persebaran Hindu di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Budiastra, Putu. 1978. *Prasasti Penida Kaja*. Denpasar: Museum Bali-Direktorat Museum-Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen P&K.
- Goris R. 1951-1952. *Inscripties Voor Anak Wungsu: Prasasti Bali*. Singaraja.
- Hoed, Benny H. 2011. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Beji Timur, Depok: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kempers, A.J. Bernet. *Monumental Bali: Introduction to Balinese Archeology & Guide to the Monuments*. Berkeley Singapore: Periplus Editions.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia I dan II*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.

- Pudja, Gede. 1983. *Kena Upanisad: Naskah-Terjemahan-Penjelasan*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu.
- Soebadio, Haryati. 1986. "Keperibadian Budaya bangsa" (Local Genius), dalam *Diskusi Ilmiah Arkeologi* 1984. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soekmono R. 1984. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 dan 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stutterheim, W.F. t.t. *Oudheiden van Bali*. Diterjemahkan oleh I Gusti Ngurah Gede Tjakra.
- Suantra, I Made, dkk. 2006. *Pura Pegulingan, Tirtha Empul, dan Goa Gajah: Peninggalan di Daerah Aliran Sungai Pakerisan dan Petanu*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali Wilayah Kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT.



INDEKS

A

Acharya Vedananda 7
Adiparwa iv, 82, 83, 87, 88, 91,
92, 110, 118, 121, 124
Agastyaparwa 82, 100, 121, 122
aji ghurnita 81
Allan Menzies 7
Anak Wungsu 38, 39, 40, 43, 47,
50
Asia Tenggara iv, 12, 13, 20, 94
Aswawarman 28
awig-awig 82

B

Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia 53
Badung 35
Bali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 61, 64, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 81, 82, 92, 99, 100, 101,
104, 105, 108, 112, 114, 116,
118, 119, 120, 123
Bali Aga 14
Bali Kuna 32, 33, 35, 40, 44, 46,
47, 120
Bangka Belitung 42
Bangli 30, 34, 36
banten 53, 55, 58, 59, 60, 61, 72
Bedawang nala 74
Bedulu 29, 32, 34, 35, 43
Belanjong 33, 35, 37
Benang Tetebus 72

benda cagar budaya 30
Benny H. Hoed 41
Betara Da Tonta 34
Betara Gede Batu Meregeg 29
Bhagawadgita 55, 66, 121
Bhalla 59
Bhineka Tunggal Ika 1
Bhuta Yadnya 61, 67
Blahbatuh 35, 43
Brahman Atman aikhyam 49
Budha 6, 15, 35, 38, 39, 44, 45,
48, 70
Bulan Pejeng 20

C

Canggal 33
Cempaga 24
cosmological dualism 21
cultural indentity 22

D

daksina 59
Dang Hyang Nirartha 15
dang kahyangan 35
Dang Upadhyaya 39
Denpasar ii, v, vi, vii, 5, 9, 10,
17, 18, 25, 30, 50, 122, 123
desa adat 12, 15, 16
desa kala patra 16
desa pakraman 16
Dewa Gede Pancering Jagat 29
dharma pagambuhan 81
dharma pawayangan 81

E

Eka Dasa Ludra 67
Ende 7
Eriksen 16, 17

F

F.D.K. Bosch 22

Flores 7

G

garudha mungkur 75

Geguritan Sinom Pancasila 97,
99, 103, 104, 105, 106, 109,
113, 114

Gelgel 30, 35

Gianyar 20, 30, 32, 34, 35, 37,
50, 68

globalisasi 2, 8

gotong-royong 41, 42

Gunung Kawi 40, 43, 47

Gurudeyamantram 76

H

Hindu iii, v, vi, vii, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
23, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 39, 41, 42,
46, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 58, 60, 61, 63, 64,
66, 67, 68, 70, 71, 75, 76,
78, 80, 100, 104, 112, 122

Hyang Tranggana 61

I

I Ketut Sudrama 24

I Made Titib vi, 7, 8, 10

India 2, 10, 33, 37, 59, 123

Indonesia v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 27,
28, 29, 30, 33, 39, 40, 42,
46, 50, 51, 53, 57, 58, 63,
68, 79, 87, 88, 89, 90, 91,
93, 94, 95, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110,
114, 115, 117, 118, 119,
120, 122, 123, 124

I Nengah Duija vi, 7

intangible 30

J

Jawa 13, 14, 15, 17, 28, 29, 33, 34,
93, 105, 122, 124

Jawa barat 33

Jawa Tengah 17, 28, 29, 33, 34

Jayapangus 37, 38, 40, 43, 44, 47

K

kahyangan jagat 35

kahyangan Tiga 35

Kakawin Arjunawijaya 82, 110,
121

Kakawin Arjunawiwaha 83,
110, 121

Kakawin Bharatayuddha 82,
121

Kakawin Kandawawanadahana
82

Kakawin Ramayana 82, 110,
118, 121

Kakawin Sumanasantaka 82,
110, 118, 120, 121

Kakawin Sutasoma 15, 83, 93,
95, 96, 110, 118, 121, 122,
123

Kalimantan 28, 33, 42, 105

Kalimantan Timur 33

Karangasem 30, 36, 43

karang memadu 36

Katholik 6

Kidung Sri Tanjung 83, 121

Kidung Sunda 83, 121, 122

Klungkung 30, 122, 123

Kristen 6

Kundungga 28

Kutai 28, 33

L

local genius 22

Lombok 13, 105

lontar Namaning Wintang 100

lontar Slokantara 101, 103, 104,
107

M

Majapahit 13, 14, 29, 32, 93, 94,
96, 97
Malinowski 21
M. Amat Asnawi 7, 10
mandala 15
Manukaya 37
Manusa Yadnya 56, 69, 79
modernisasi 2
modern state 1
Mpu Tantular 15, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 122
multibudaya 2

N

nation-state building 1
Negara Kesatuan Republik In-
donesia (NKRI) 1, 2, 4, 6,
7, 10, 58, 87, 91, 93, 95, 97,
98, 101, 104, 105, 106, 107,
110, 118
nistaning nista 53
Nusa Dua 35

O

Orde Baru 53
otonan 71

P

Padmasana 75, 76
Pallawa 28
Panca Walikrama 67
Panca Yadnya 56
Parahyangan 77
paswara 82
Pawongan 77
Payangan 30
Pedanda Sakti Wawu Rawuh 15
Pedawa 24
Pekerisan 29, 30, 31, 32

Pelemahan 77
Penglipuran 36
perundagian 19, 21, 23
Petanu 29, 30, 31, 32, 51
Puja Mandala 35
Pura Besakih 13, 15, 17, 30, 43
Pura Jumeneng 30
Pura Manik Liu 30
Pura Pegulingan 35, 51
Pura Penataran Sasih 20, 30, 37
Pura Putra Betara 34
Pura Sebilang Bukian 30

Q

Quaritch Wales 22

R

relasi sosial 7, 13, 16
Rwa-Bihneda 75

S

Sanjaya 33
Sanskerta 28, 33
Sanur 30, 33
Sawa Wedana 56, 62
Sembiran 24, 25
Sidadapa 24, 36
Siwakangsita 34, 37
Siwanirmala 34
Siwa Nirmala 37
Siwapradnya 34, 37
Soekarno 7, 88, 97
Sri Kesari 25, 31, 32, 33, 34, 37
subak 12, 38, 40, 71
subak Kumba 38
Subak Pulagan 38
Sukawana 34, 37
Sulawesi 42, 105
Sumatera 42

T

Tabuh Rah 61
Tampaksiring 35, 43

tangible 30
Tantri Kamandaka 82, 106, 116,
122
Tarumanegara 33
Tat Twam Asi 49
Tegallalang 20
Tenganan 27, 36
Tigawasa 24
tirta amreta 84, 91
Tirta Empul 38
Tri datu 71
Tri Hita Karana 12, 66
Trunyan 29, 34
Tutur Aji Janantaka 121
Tutur Jñanasidhanta 121
Tutur Siwagama 121

U

Udayana Warmadewa 47, 50
Undang-Undang Dasar 1945 1
unity in diversity 15
Upanisad 49, 51
utamaning utama 53, 55

W

Wallace Line 12
wamcakarta 28
Waprakeswara 28, 33
Wariga 100, 121
Warmadewa v, 5, 25, 31, 32, 33,
47, 50

2010 ia terpilih sebagai Dosen Terbaik mewakili Universitas Udayana. Sejak 2003, ia sebagai anggota IFSSO (International Federation of Social Science Organizations), dan sejak 2009 sampai 2011 dipilih sebagai Second Vice President dan dipilih kembali sebagai First Vice President kembali sejak 2011 hingga sekarang. Ikut sebagai founding member dari World SSH (World Social Sciences and Humanities) yang dikepalai Professor Dr. Michael Kuhn dari Jerman. Pernah mengepalai International Office (IO) Universitas Udayana-Bali 2009 sampai 2013 dan Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana. E-mail address: phejepsdrliipi@yahoo.com.



A.A. GEDE RAKA, dikenal sebagai guru, penulis, seniman dan budayawan Bali yang telah melahirkan begitu banyak cipta dan berkontribusi pada pengembangan seni dan budaya Bali di berbagai pentas nasional maupun internasional.

Priakelahiran Tatiapi, Pejeng, Tampaksiring Gianyar ini telah menamatkan studi Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Pascasarjana (S2) Universitas Hindu Indonesia, di Denpasar pada tahun 2008, dan menamatkan Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar.

Sembari melanjutkan studinya, Anak Agung Gede Raka mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Denpasar dan juga sebagai dosen tamu di STMIK STIKOM Bali, memberi kuliah umum tentang keterkaitan seni budaya Bali dan teknologi. Juga telah mempublikasikan banyak karya tulis terkait pusaka budaya Bali, dan dalam tiga tahun belakangan ini telah menulis tentang 100 Tahun Mpu Kuturan, Kebo Iwa Patih Amengku Bhumi Jaman Bali Kuna (selaku Ketua Tim), Pura Khayangan Jagat Air Jeruk, Sukawati, Gianyar, kemudian selaku Ketua Tim menggarap Mangapura Ibu Kota Kabupaten Badung, lalu Pura Khayangan Jagat Masceti-Medahan-Keramas, Blabatuh, Gianyar dan sebagai anggota tim perumusan dan penulisan Blue Print Revitalisasi

Buku yang diberi judul *Pancasila, Kearifan Lokal, dan Masyarakat Bali* di dalamnya menguraikan tentang kontribusi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan budaya Bali yang berkaitan dengan sudut pandang falsafah kenegaraan yang terdapat didalam Pancasila. Kajian ini diharapkan nantinya akan menambah wawasan dan perspektif tentang agama dan kepercayaan yang ada di Bali pada khususnya, serta diharapkan masyarakat memahami nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum yang berkaitan dengan Pancasila.

Mayjen TNI Purn. Wisnu Bawa Tenaya

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Kajian ini mengangkat permasalahan kearifan lokal, masyarakat Bali dan Pancasila dalam kaitannya dengan bagaimana kearifan lokal yang sudah ada lama di Bali sebelum hingga setelah masuknya agama Hindu serta perkembangan masyarakat dan budaya Bali pada masa modern dan postmodern ini dapat memberikan kontribusinya pada pemahaman tentang sila-sila pada Pancasila.

Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M. A.

*Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
BP Universitas Hindu Indonesia Denpasar*



Universitas Hindu Indonesia